



0273/ED/082015



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

A

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : Dr. Ir. H. WAHYU PURWANTO, M.S.I.E.
- 2. Jabatan : CALON WAKIL BUPATI - GUNUNG KIDUL
- 3. Tempat & Tanggal Lahir : BONDOWOSO, 21 November 1961
- 4. Alamat Kantor : Jl. ---, ---
- 5. Tanggal Pelaporan LHKPN : 27 Juli 2015

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH & BANGUNAN)

- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1. Tanah & Bangunan seluas 126 m2 & 38 m2, di Kabupaten SLEMAN, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 2012 sampai dengan 2015 NJOP Rp.220.016.000 | Rp. | 220.016.000 |
|---|-----|-------------|

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA

- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2014, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2014 nilai jual Rp.10.000.000 | Rp. | 298.000.000 |
| 2. Motor, merk HONDA, tahun pembuatan 2014, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2014 nilai jual Rp.10.000.000 | | |
| 3. Mobil, merk TOYOTA RUSH, tahun pembuatan 2015, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 2015 nilai jual Rp.278.000.000 | | |

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA

c. HARTA BERGERAK LAINNYA

C. SURAT BERHARGA

D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA

- | | | |
|--|-----|-----------|
| 1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.7.319.127 | Rp. | 7.319.127 |
|--|-----|-----------|

E. PIUTANG

TOTAL HARTA (II)

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)

	Rp.	220.016.000
	Rp.	298.000.000
	Rp.	7.319.127
	Rp.	525.335.127
	Rp.	525.335.127

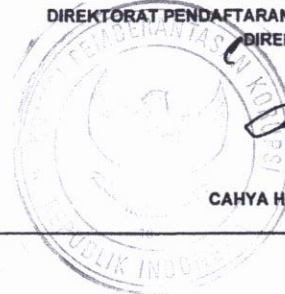
MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
PLH. DEPUTI

CAHYA H. HAREFA

Jakarta, 21 September 2015

DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN

DIREKTUR



CAHYA H. HAREFA

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.